PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR

# LAKIP 2019

## BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

@Balitbangren

042821120

Bappedalitbang@polmankab.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Balitbangren pada tahun 2019 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tergambar pada pencapaian Kinerja Balitbangren.

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019, dengan capaian sebagai berikut :

| Sasaran Strategis dan indikator | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran** | Baik | Baik | 100 |
| **Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder** | | | |
| **Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja** | BB(70) | BB(77.45) | 100.65 |
| **Indikator : Predikat SAKP Perangkat Daerah** | | | |
| **Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah** | WTP | WTP | 100 |
| **Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan** | | | |
| **Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah** | 100 | 100 | 100 |
| **Indikator : Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu** | | | |
| **Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan** | 35 | 40 | 114.29 |
| **Indikator : Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan** | | | |
| | | **Rata-rata Kinerja** | **102.99** |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah, rahmat, serta hidayahNya-lah sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 dapat diselesaikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja Balitbangren dibuat sebagai bentuk komitmen guna terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Polewali Mandar, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efesien. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

Laporan Kinerja ini disajikan dalam 4 (empat) Bab, yaitu Bab Pendahuluan, Bab Perencanaan Kinerja, Bab Akuntabilitas Kinerja dan Bab Penutup. Laporan ini menyajikan data dan informasi terkait target dan capaian indicator Kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balitbangren tahun 2019-2024 serta target dan dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif mengenai kinerja Balitbangren pada tahun 2019. Secara umum sasaran yang direncanakan pada tahun 2019 dapat dilaksanakan dengan baik, namun kami manyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki serta kelemahan yang harus disempurnakan. Oleh karna itu masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan sangat diharapkan. Selain itu diperlukan dukungan dan kerja keras semua pihak agar Kinerja Balitbangren menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Polewali, 31 Januari 2020
**Kepala Balitbangren,**

**Drs. H. Darwin Badaruddin, M.Pd**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19610822 198803 1 010

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI .....ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .....1
B. Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi OPD .....3

BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis .....7
B. Penetapan Kinerja Tahun 2019 .....11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
A. Akuntabilitas Kinerja .....23
B. Akuntabilitas Keuangan .....51

BAB IV PENUTUP .....54

LAMPIRAN
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
II. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
III. Realisasi Anggaran Tahun 2019

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL


| | | |
|---|---|---|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan | 5 |
| Tabel 2.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | 10 |
| Tabel 2.2 | Perjanian Kinerja Tahun 2019 | 12 |
| Tabel 3.1 | Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2019 | 25 |
| Tabel 3.2 | Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 | 26 |
| Tabel 3.3 | Realisasi Indikator dan Sasaran 1 | 27 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 1 | 30 |
| Tabel 3.5 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1 tahun 2019 dengan target RENSTRA Balitbangren Tahun 2019-2023 | 31 |
| Tabel 3.6 | Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1 | 31 |
| Tabel 3.7 | Realisasi Indikator dan Sasaran 2 | 33 |
| Tabel 3.8 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 2 | 37 |
| Tabel 3.9 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2 tahun 2019 dengan target RENSTRA Balitbangren Tahun 2019-2023 | 39 |
| Tabel 3.10 | Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2 | 39 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Indikator dan Sasaran 3 | 40 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 3 | 42 |
| Tabel 3.13 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3 tahun 2019 dengan target RENSTRA Balitbangren Tahun 2019-2023 | 42 |
| Tabel 3.14 | Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3 | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| Tabel 3.15 | Realisasi Indikator dan Sasaran 4 | 44 |
| Tabel 3.16 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 4 | 46 |
| Tabel 3.17 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2019 dengan target RENSTRA Balitbangren Tahun 2019-2023 | 46 |
| Tabel 3.18 | Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 4 | 47 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Indikator dan Sasaran 5 | 47 |
| Tabel 3.20 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 5 | 49 |
| Tabel 3.21 | Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5 tahun 2019 dengan target RENSTRA Balitbangren Tahun 2019-2023 | 50 |
| Table 3.22 | Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 5 | 50 |
| Tabel 3.23 | Efesiensi Keuangan (Fisik dan Keuangan) tahun 2019 | 51 |


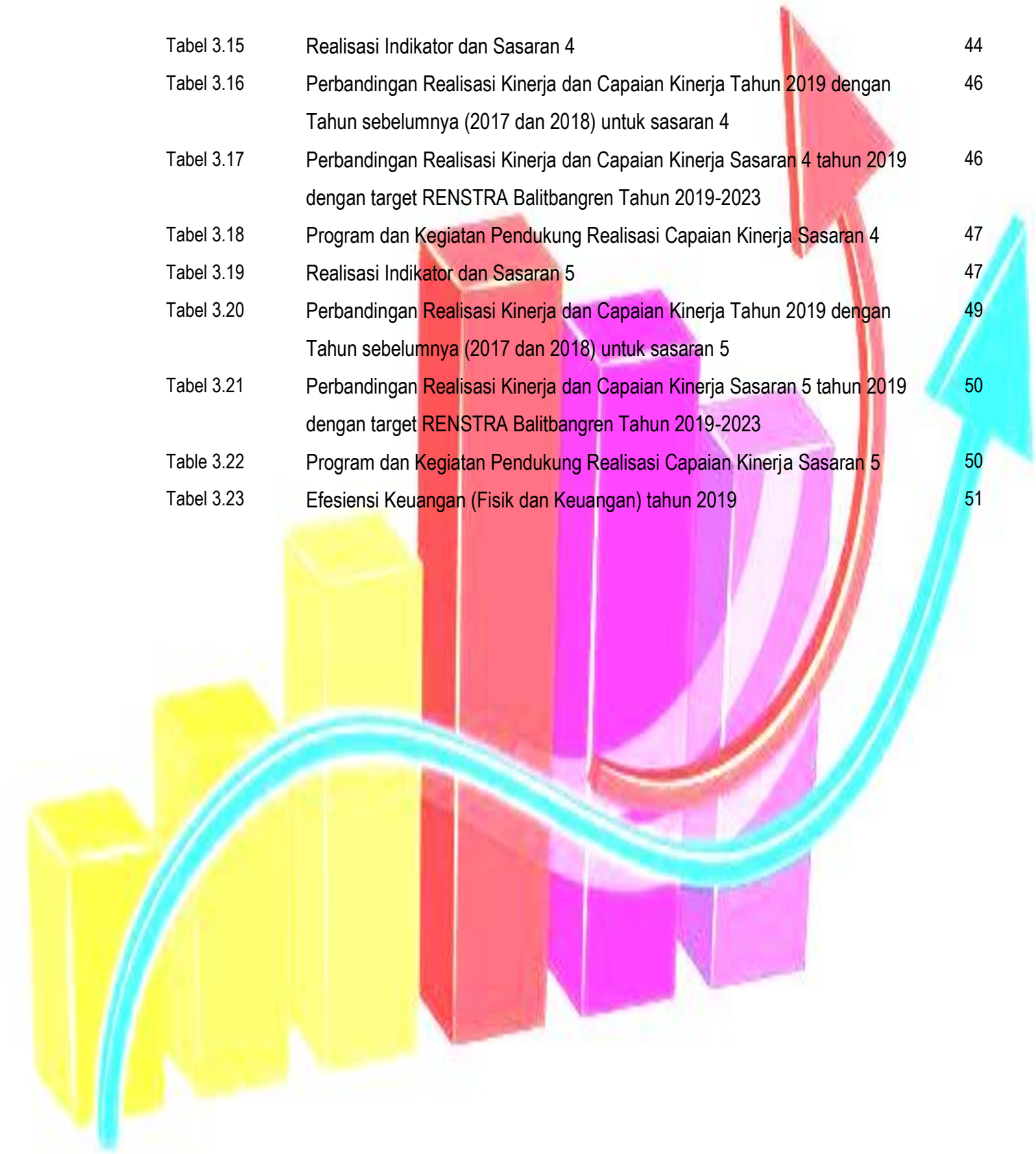

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang baik *(good governance)* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini, merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah dan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

LAKIP ini merupakan pertanggunggjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pasal 7 ayat (1) Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

### 1. Dasar Hukum

Dokumen LAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Bupati Polewai Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 adalah:

1. Memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja instansi sehingga diketahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
2. Sebagai parameter penilaian kinerja SKPD;
3. Memberikan feetback terhadap upaya peningkatan kinerja tahun berikutnya;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik di penelitian pengembangan dan perencanaan;
5. Sebagai media koreksi, perbaikan dan pengembangan Program dan Kegiatan Kerja SKPD pada periode kerja selanjutnya;
6. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk meningkatkan kinerjanya;
7. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

## B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, terdiri dari:
   - Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
   - Sub. Bagian Perencanaan & Pelaporan
   - Sub. Bagian Keuangan & Verifikasi
c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
   - Sub Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
   - Sub Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan, Kepariwisataan dan ESDM
   - Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
d. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari:
   - Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
   - Sub Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan
   - Sub Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan
e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
   - Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air
   - Sub Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan
   - Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Data Geospasial
f. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, terdiri dari:
   - Sub Bidang Perencanaan Makro
   - Sub Bidang Pengendalian
   - Sub Bidang Pelaporan Kinerja Pembangunan

## 1. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, kedudukan Balitbangren adalah unsur penunjang tugas Pemerintah Kabupaten dalam bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Balitbangren sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

   Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta perencanaan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi

   Selain tugas pokok tersebut di atas, juga telah ditetapkan fungsinya adalah sebagai berikut:

   - penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
   - pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
   - pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
   - dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan;
   - pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang penelitian dan pengembangan serta perencanaan; dan
   - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Serta berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada Badan penelitian, pengembangan dan perencanaan dibentuk UPTD Agro Techno Park sebagai fungsi penunjang yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang. Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan.

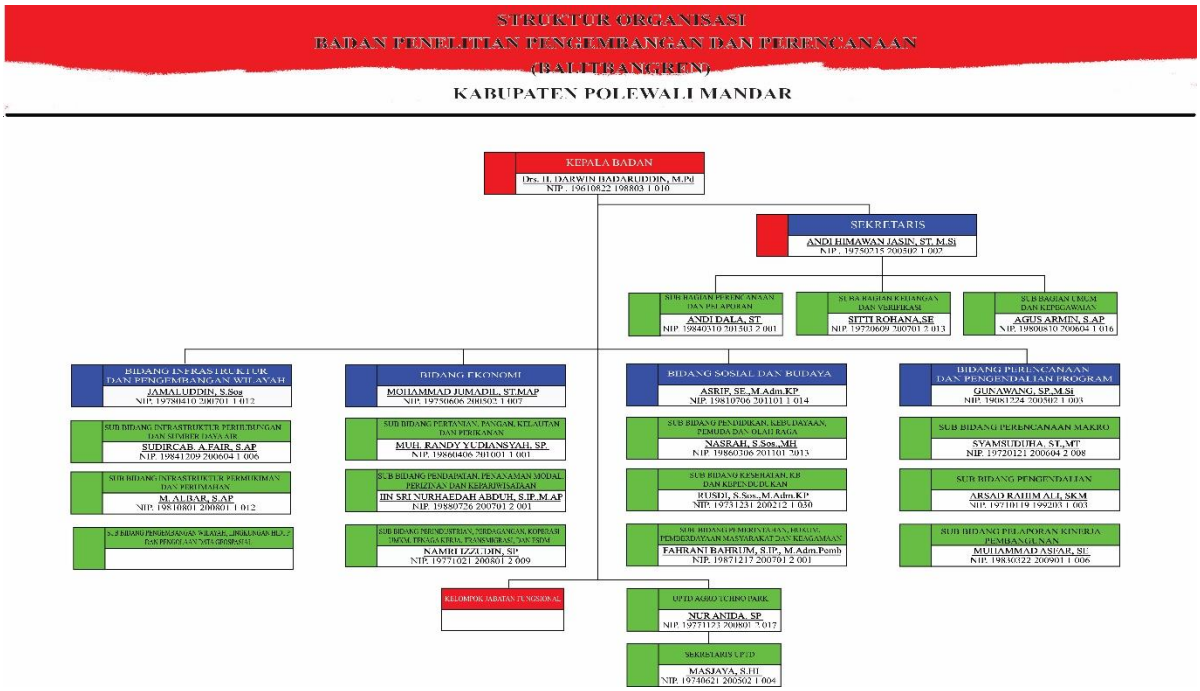


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

## 2. Isu Strategis Organisasi

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam fungsi Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Penelitian dan Pengembangan masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Perubahan Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana (Implementasi aplikasi SIMDA Perencanaan)
2. Belum terbangunnya system informasi data pembangunan
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan masih tahap uji coba belum sepenuhnya dilakukan kajian mendalam Penyebabnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan

4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan serta pengelolaan data yang belum terpusat pada satu wilayah pengelolaan

### 3. Ruang Lingkup Penyusunan LAKIP

Ruang Lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 yang merupakan bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019.

### 4. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2019 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar didukung Anggaran Belanja Daerah. Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp. 8.324.963.336,- Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 2.685.911.436,- Belanja Langsung Rp. 5.639.051.900,-.

### 5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019 ini terdiri dari empat (4) bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan organisasi, tugas dan fungsi Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar, tugas pokok dan fungsi organisasi, kondisi organisasi, ruang lingkup, anggaran dan sistematika penyusunan LAKIP.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Memuat tentang rencana strategis,indikator kinerja utama dan rencana kinerja tahunan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Memuat tentang pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran strategis, akuntabilitas penggunaan anggaran, dan realisasi

**Bab IV Penutup**

Memuat tentang kesimpulan dan saran

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis (Renstra) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan demikian Renstra merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang diinginkan selama kurun waktu tertentu dengan memperhitungkan faktor - faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor- faktor eksternal yang berupa peluang dan tantangan. Guna mencapai tujuan organisasi dokumen Renstra memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dijabarakan ke dalam tujuan, sasaran, program serta kegiatan yang realistis dan terukur sebagai pedoman segenap anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan.

Dokumen perencanaan strategis tingkat SKPD berupa dokumen Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan tingkat kabupaten berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

Adapun visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah:

### 1 Visi

Visi adalah merupakan cara pandang jauh kedepan tentang keamanan Dinas ini akan diarahkan dan apa yang dicapai, sejalan visi dan arah pembangunan Kabupaten Polewali Mandar jangka panjang, pendek serta memperhatikan peran dan potensi yang ada maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2024 berdasarkan Naskah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Polewali Mandar yakni : **"POLEWALI MANDAR MAJU , RAKYAT SEJAHTERA"**

## 2 Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar di atas, maka ditetapkan empat misi pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Mewujudkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religious
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Keunggulan Wilayah
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern

Dari Visi dan 4 (empat) Misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, visi yang relevan dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah pada misi 4 yaitu "Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Modern".

**1) Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019-2024 adalah **"Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas"**

**2) Sasaran**

Setelah ditetapkan tujuan, selanjutnya ditentukan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran menggambarkan hasil yang ingin diraih dengan cara menggunakan sumberdaya yang dimiliki organisasi secara efisien dan efektif juga merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan capaian terukur dari tujuan yang dirumuskan.

Adapun sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan.

Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud , maka perlu menentukan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C, yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiiliki batas waktu pencapaian) dan *continously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran merupakan indikator dilevel outcome (hasil). Indikator sasaran strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Disamping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama).

Untuk mengukur Tujuan dan Sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan serta target-targetnya, kami sajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2019-2024 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2 | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | A | A | A | A |
| 3 | | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah | Opini Pengelolaan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 4 | Terwujudnya Sistem Perencanaan pembangunan Yang Berkualitas | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | | Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | 35% | 50% | 65% | 80% | 100% | 100% |

## B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja tahunan 2019 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar yang mana tujuannya merupakan operasionalisasi yang menunjukkan hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu atau tahunan.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun anggaran 2019 yang telah disusun Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sumber anggaran yang digunakan adalah anggaran APBD Kabupaten Polewali Mandar. Adapun rencana indikator kinerja tahun 2019 Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanian Kinerja Tahun 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu | Persen | 100% | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar |
| | | | | | 1 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD | 1 Jumlah Dokumen yang tersusun |
| | | | | | 2 Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD | 2 Jumlah Dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang disusun |
| | | | | | 3 Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD | 3 Jumlah Dokumen RKPD Kab. Polewali Mandar |
| | | | | | 4 Penyusunan dan Penetapan RKPD perubahan | 4 Jumlah Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 yang disusun |
| | | | | | 5 Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian DAK | 5 Jumlah dokumen usulan DAK Tahun Anggaran 2019 yang disusun |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD |
| | | | | | 6 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD | 6 Jumlah dokumen hasil Musrenbang |
| | | | | | 7 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | 7 Jumlah dokumen hasil Musrenbang |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 8 Orientasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah | 8 Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Orientasi |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD |
| | | | | | 9 Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan | 9 Jumlah laporan hasil koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah yang disusun |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Persentase rata-rata capaian program pembangunan daerah |
| | | | | | 10 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDA Perencanaan) | 10 Jumlah paket aplikasi sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dalam kondisi optimal |
| | | | | | 11 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan | 11 Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang ditetapkan sesuai standar |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 1 Revisi Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | 1 Jumlah dokumen perencanaan sektoral |
| | | | | | 2 Analisis dan Updating Data Geospasial | 2 Cakupan Wilayah yang di Data |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah antara :<br>- RPJMD dengan RENSTRA<br>- RKPD dengan RENJA |
| | | | | | 3 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan | 3 Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan sektoral Bidang Infrastruktur Permukiman dan Perumahan |
| | | | | | 4 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air | 4 Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air |
| | | | | | 5 Koordinasi dan Advokasi Perencanaan Sektoral Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup | 5 Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah |
| | | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektor Perhubungan dan Sumber Daya Air | 6 Jumlah Dokumen laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan dan Sumber Daya Air |
| | | | | | 7 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sektor Permukiman dan Perumahan | 7 Jumlah Dokumen laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan |
| | | | | | 8 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Sektor Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 8 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Ekonomi antara :<br>- RPJMD dengan RENSTRA<br>- RKPD dengan RENJA |
| | | | | | 1 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 2 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan | 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan |
| | | | | | 3 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM | 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral Bidang Ekonomi |
| | | | | | 4 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan | 4 Jumlah Paket Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan Kepariwisataan |
| | | | | | 5 Monitoring dan Evaluasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM | 5 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan | 6 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya | Persentase keselarasan program/kegiatan OPD Bidang Sosial Budaya antara :<br>- RPJMD dengan RENSTRA<br>- RKPD dengan RENJA |
| | | | | | 1 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga |
| | | | | | 2 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan | 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan |
| | | | | | 3 Koordinasi Perencanaan Sektoral Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan | 3 Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan |
| | | | | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya | Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral bidang Sosial Budaya |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 4 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | 4 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga |
| | | | | | 5 Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan | 5 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan |
| | | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan | 6 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Penelitian dan pengembangan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | Persen | 35% | Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan | Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan |
| | | | | | 1 Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan | 1 Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan |
| | | | | | 2 Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga | 2 Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 3 Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan | 3 Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan |
| | | | | | 4 Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pemerintahan, Hukum Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan | 4 Jumlah Dokumen Hasil Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Hukum Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan |
| | | | | | 5 Diseminasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terpadu | 5 Jumlah Rekomendasi Hasil Diseminasi Kajian, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Predikat | Baik | Program Manajemen Perkantoran | Persentase tertib ketatausahaan kantor |
| | | | | | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola |
| | | | | | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2 Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi |
| | | | | | 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | 3 Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin |
| | | | | | 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor | 4 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5 Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia |
| | | | | | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | 6 Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia |
| | | | | | 7 Penyediaan Makanan dan Minuman | 7 Jumlah makan minum yang tersedia |
| | | | | | 8 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 8 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah |
| | | | | | 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | 9 Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah |
| | | | | | 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia |
| | | | | | 11 Pengadaan peralatan gedung kantor | 11 Jumlah jenis alat-alat gedung kantor yang tersedia |
| | | | | | 12 Pengadaan Mebeleur | 12 Jumlah jenis mebeleur |
| | | | | | 13 Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya | 13 Jumlah unit komputer PC/notebook |
| | | | | | 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 14 Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara |
| | | | | | 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 15 Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 16 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | 16 Jumlah unit kendaraan dinas/operasional |
| | | | | | 17 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 17 Luas Gedung dan halaman kantor kondisi bersih |
| | | | | | 18 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 18 Jumlah jenis peralatan kerja yang terpelihara |
| | | | | | 19 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 19 Jumlah pakaian dinas yang tersedia |
| | | | | | 20 Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis | 20 Jumlah Pegawai yang menyelesaikan, pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat | BB | Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 1 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah | 1 Jumlah dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 2 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah | 2 Jumlah dokumen Rencana Kerja (RENJA) tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah | 3 Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | | | | | 4 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 4 Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 5 Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah | 5 Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 6 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah | 6 Jumlah dokumen |
| 5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah | Opini Pengelolaan Keuangan | Opini | WTP | Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu |
| | | | | | 2 Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah | 2 Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

## A. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan – keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018. Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019 ini akan dijelaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja OPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja mencakup 4 (empat) unsur utama, yaitu :

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Target outcome yang dietapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara Perbandingan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

**A.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2019**

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Balitabangren bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil
b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil
c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil
d. Capaian kinerja <50%= Kurang Berhasil.

Berdasarakan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Badan Penelitian Pengembangan dan Penelitian dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan secara umum realiasi atas target yang telah ditetapkan adalah 100% Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja dibawah ini. Dalam proses pengukuran kinerja ini perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efesiensi dan efektivitas. Selain itu untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten, maka penetapan indikator dan target kinerja dilakukan dengan memperhatikan capaian-capaian sebelumnya untuk menetapkan perencanaan di masa yang akan datang melalui Analisis

Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja. Untuk setiap sasaran yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja sasaran Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Tahun 2019 untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Utama (IKU) Tahun 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN | | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN (%) | PREDIKAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SATUAN | TAHUN 2019 | | | |
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan yang disusun dikali 100 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Sangat Berhasil |
| 2 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | 2. | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan dibagi dengan jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan dikali 100 | % | 35.00 | 40.00 | 114.26 | Sangat Berhasil |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Jumlah jenis administrasi perkantoran yang diberikan dalam satu tahun dibagi jumlah jenis administrasi perkantoran yang ada dikali 100 | % | Baik | Baik | 100.00 | Sangat Berhasil |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 4. | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat | % | 70.00 | 77.45 | 100.65 | Sangat Berhasil |
| 5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah | 5. | Opini Pengelolaan Keuangan | Opini atau nilai atas hasil pengelolaan keuangan daerah oleh BPK perwakilan Sulawesi barat | % | WTP | WTP | 100.00 | Sangat Berhasil |

### A.2. Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2017, 2018 dan 2019

Pencapaian Kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Periode Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja tahun pertama Renstra Periode 2019-2024 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Renstra 2014-2018 untuk mengetahui

kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2019, 2018 dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan capaian kinerja Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | | CARA PERHITUNGAN INDIKATOR SASARAN | SATUAN | REALISASI TAHUN 2017 | REALISASI TAHUN 2018 | REALISASI TAHUN 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. | Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen perencanaan yang disusun dikali 100 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | 2. | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan dibagi dengan jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan dikali 100 | % | 16.67 | 40 | 40 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | 3. | Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder | Jumlah jenis administrasi perkantoran yang diberikan dalam satu tahun dibagi jumlah jenis administrasi perkantoran yang ada dikali 100 | Predikat (Nilai) | N/A | Baik | Baik |
| 4 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | 4. | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | Predikat atau nilai atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Inspektorat | Predikat (Nilai) | N/A | BB | BB |
| 5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah | 5. | Opini Pengelolaan Keuangan | Opini atau nilai atas hasil pengelolaan keuangan daerah oleh BPK perwakilan Sulawesi Barat | Opini (Nilai) | N/A | WTP | WTP |

**A.3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.**

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat factor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

**A.3.1. Sasaran 1 :**

"Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"

**a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019**

Hasil evaluasi capaian kinerja **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah** melalui indicator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil.

Pencapaian indicator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Realisasi Indikator dan Sasaran 1

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
| **Persentase Dokumen Perencanaan yang ditetapkan tepat waktu** | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan analisis terhadap persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu, realisasi sebesar 100% dari target 100%. Realisasi ini terlihat dari tersususnnya dokumen perencanaan diantaranya :

1. Dokumen RPJMD Tahun 2019-2024

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD, RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 ini memuat visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang selanjutnya dijabarkan kedalam startegi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah.

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Tim Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan beserta OPD penyusun dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 bekerja secara efektif dan serius menyusun mulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta melakukan coaching clinik bersama dengan tenaga ahli penyusun RPJMD Tahun 2019-2024.

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian terkait untuk memastikan perencanaan kegiatan sudah sesuai dengan tahapan yang ada

**Kendala :**

- Koordinasi antar OPD untuk proses perencanaan masih lemah
- Pengimplementasian aplikasi SIMDA integrated menjadi hal baru dalam proses perencanaan yang melibatkan seluruh OPD, sehingga dalam penginputan ke aplikasi terkadang menjadi penghambat dalam proses perencanaan.
- Perubahan Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana
- Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) perencana baik di Lingkungan Internal Bappeda Litbang maupun di OPD.

**Solusi :**

- Membangun koordinasi antar OPD dalam proses perencanaan
- Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perencana

2. Dokumen RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan 2019

   Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun oleh pemerintah dengan mengacu pada dokumen RPJMD. RKPD memuat tentang rencana-rencana kerja, program kegiatan strategis yang akan dilakukan selama satu tahun dalam rangka mewujudkan program prioritas atau visi misi dalam RPJMD.

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Tim penyusun dokumen RKPD Tahun 2020 bekerja secara efektif menyusun mulai dari tahapan perencanaan sampai tersususnnya dokumen

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait untuk memastikan perencanaan kegiatan sudah sesuai dengan tahapan yang ada

**Kendala :**

- Koordinasi antar OPD untuk proses perencanaan masih lemah
- Pengimplementasian aplikasi SIMDA integrated menjadi hal baru dalam proses perencanaan yang melibatkan seluruh OPD, sehingga dalam penginputan ke aplikasi terkadang menjadi penghambat dalam proses perencanaan.
- Perubahan Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang terbit pada pertengahan tahun rencana
- Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) perencana baik di Lingkungan Internal Bappeda Litbang maupun di OPD

**Solusi :**

- Membangun koordinasi antar OPD dalam proses perencanaan
- Melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perencana

3. Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

   Dokumen RTRW merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang disusun oleh pemerintah berdasarkan amanat undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTRW Kabupaten Polewali Mandar setelah melalui proses peninjauan kembali maka perlu dilakukan revisi dokumen, revisi dilakukan karena adanya dinamika pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Tim Teknis Penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2032 bekerja secara efektif menyusun mulai dari tahapan perencanaan sampai tersusunnya dokumen dengan pihak ketiga sebagai Penyusun dokumen, karena penyusunan revisi dokumen RTRW melalui pihak ketiga

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian terkait untuk memastikan penyusunan dokumen sudah sesuai dengan tahapan yang ada

**Kendala :**

- Pelaksanaan penyusunan dokumen revisi RTRW melalui pihak ketiga dan melalui proses pelelangan sehingga terjadi keterlambatan waktu
- Penyusunan Dokumen RPJMD dan Penyusunan dokumen revi RTRW dilakukan ditahun yang sama sehingga dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) handal, namun kondisi SDM di Balitbangren tidak banyak sehingga terjadi tumpang tindih tanggung jawab.
- Perubahan Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur perencanaan tata ruang wilayah
- Kurangnya Sumber daya manusia (SDM) selaku tim teknis di Lingkungan Internal Bappeda

**Solusi :**

- Membangun koordinasi dengan pihak ketiga (konsultan)

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 1

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah** | Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai standar | 100% | 100% | 100% |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Realisasi Kinerja antara 2017, 2018 dan 2019 tercapai dinilai 100% yang artinya dokumen perencanaan yang disusun sesuai dengan standard an tepat waktu.

## c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 1 tahun 2019 dengan target jangka menengah (RENSTRA) Balitbangren Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pemerintah yang bersih akuntabel dan Modern | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Balitbangren tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu.

## d. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun sejumlah Program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya sasaran ini, sebagai berikut :

Tabel 3.6. Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

| Program | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah** | **813.107.000** | **813.000.870** | **99.98** |
| **a. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD** | 47.082.500 | 47.073.800 | 99.98 |
| **b. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD** | 289.817.300 | 289.771.670 | 99.98 |
| **c. Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD** | 68.843.400 | 68.838.000 | 99.99 |
| **d. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD** | 40.875.300 | 40.847.200 | 99.93 |
| **e. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD** | 58.924.600 | 58.908.300 | 99.97 |
| **f. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMDA Perencanaan)** | 307.563.900 | 307.561.900 | 100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah** | **748.659.000** | **744.839.992** | **99.49** |
| **a. Revisi Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah** | 748.659.000 | 744.839.992 | 99.49 |

e. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indicator sasaran Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu yang dijalankan oleh Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program dengan Jumlah Pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan 1 Program yang anggarannya sebesar **Rp. 1.251.553.700,-**

### A.3.2. Sasaran 2 :

"**Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan**"

#### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan dengan 1 (satu) indicator kinerja, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 114.26% dengan predikat sangat berhasil

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7. Realisasi Indikator dan Sasaran 2

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
| **Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan** | 35% | 40% | 114.26% |

Berdasarkan analisis terhadap persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan, realisasi sebesar 40% dari target 35%. Realisasi ini berdasarkan hasil penelitian yang diterapkan, dari target 5 kajian penelitian dan pengembangan ada 2 kegiatan kajian penelitian yang telah diterapkan dan dimasukkan sebagai inovasi di dalam dokumen RKPD tahun 2019. Kedua kegaiatan penelitian tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi

   Polman Agro Techno Park merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang secara organisasi berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan (selanjutnya disebut Balitbangren) Kabupaten Polewali Mandar, UPTD Polman Agro Techno Park (selanjutnya disebut "Polman Agro techno Park") melaksanakan urusan penunjang penelitian dan pengembangan sector pertanian terpadu dan collaboration center dari hulu hingga hilir khususnya komoditi padi, Palawija (kedele) dan Peternakan (sapi).

   Polman Agro Techno Park mulai melakukan aktivitas pada pertengahan tahun 2015 melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Badan Tenaga Nuklir

Nasional (BATAN) dalam bentuk kegiatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertanian terpadu (PHLPT) yang akan terus dilaksanakan hingga tahun 2019.

Aktivitas utama pada awal kerjasama ini tahun 2015, dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan yang berasal dari Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, BP4KKP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UMKM dan akan terus berlangsung hingga tahun 2019.

Komoditi yang dikembangkan adalah penelitian dan pengembangan (Riset) tanaman padi, kedelai dan ternak sapi mulai dari hulu hingga ke hilir termasuk di dalamnya penguatan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia, untuk sector hilir didorong untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang mengelola bisnis dari 3 (tiga) komoditi utama yang dikembangkan melalui pertanian Terpadu ini.

Sebagai UPTD yang baru berdiri tahun 2018 ini, Polman Agro Techno Park ditempatkan pada satu kawasan di Desa Nepo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dengan luas lahan ± 2 Hektare, yang difungsikan sebagai kawasan perkantoran, kawasan penagkaran benih unggul padi dan kedele, pelayanan penyuluhan pertanian, pelayanan usaha peternakan, layanan green house dan pengembangan Pusat Inkubator Bisnis serta Gudang perbenihan padi dan kedele.

Kegiatan Litbang yang dilaksanakan yaitu :

- Hasil Litbang 1 : pembuatan Kertas Jerami
- Hasil Litbang 2 : Kompor Briket Sekam Padi
- Hasil Litbang 3 : Budidaya Ayam kampong super bagi RTM

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Pembuatan kertas jerami, factor pendorong dilakukannya kegiatan ini karena Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah memiliki luas lahan panen untuk komoditi padi sebesar ± 59.111 Ha per tahun (BPS 2018) dengan potensi jumlah produksi padi sekitar ± 386.031,6 Ton. Dari jumlah produksi padi tersebut, dapat menghasilkan limbah jerami sekitar 7% dari produksi padi, yang artinya akan terdapat sekitar ± 413.053,81 Ton jerami yang dihasilkan setiap tahun di Kabupaten Polewali Mandar. Umumnya masyarakat tani memperlakukan jerami dengan cara membakar dan hanya sebahagian kecil saja yang mengolah menjadi pakan ternak dan bahan baku lainnya, sehingga melalui kajian ini diujicoba untuk membuat kertas dari bahanm baku jerami.

- Kompor Briket Sekam Padi, faktor pendukung dilakukannya kegiatan ini adalah untuk memanfaatkan sekam padi padi menjadi briket sehingga menjadi alternative lain sebagai bahan bakar kerena terbatasnya penggunaan minyak tanah. Kompor briket sekam sudah mulai dikembangkan sejak lama dan pada tahun 2006 pernah diproduksi secara massal namun tidak diikuti dengan penyedia an bahan bakar berupa briket sampai kepada took-toko kelon tong seperti bahan bakar minyak tanah jaman dulu. Penelitian ini dilakukan di ATP dan akan dilakukan riset sampai kepada pemasaran dengan menyediakan BRIKET SEKAM sampai ke took-toko kelontong dan diawal akan menyasar ke kampong-kampung.
- Budidaya ayam kampong super bagi RTM, factor pendukung dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan RTM dengan melakukan pendampingan untuk budi daya dan manajemen pengelolaan sehingga usaha bisa berlanjut.

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Pembuatan Kertas Jerami sudah dapat mengolah jerami menjadi kertas
- Kompor Briket Sekam padi sudah dapat menghasilkan kompor briket sekam padi dan sudah mampu membuat briket dari sekam padi
- Budidaya ayam kampong super bagi RTM sudah mampu membudidayakan ayam kampong super dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan

**Kendala :**

- Masih terbatasnya peralatan yang digunakan untuk menghasilkan kertas jerami. Kertas yang dibuat masih dalam jumlah terbatas
- Produk yang dihasilkan belum dikenal sehingga perlu sosialisasi untuk promosi dan memperkenalkan produk tersebut
- Jumlah RTM yang didampingi untuk membudidayakan ayam kampung super terbatas

**Solusi :**

- Dilakukan sosialisasi untuk memperkenalkan produk kertas jerami dan kompor briket sekam padi
- Diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang pembuatan kertas jerami dan kompor briket dan budidaya ayam kampong super
- Dilakukan penelitian lanjutan untuk pengembangan kertas jerami dan kompor briket sekam padi.

2. Sekolah Pengantin

Sekolah Pengantin, merupakan akronim dari Strategi Kelola Keluarga Sehat melalui Pembelajaran Stunting Bagi Calon Pengantin. Program ini fokus pada pembelajaran bagi pasangan calon pengantin dalam strategi membangun keluarga yang sehat terbebas dari stunting, secara terintegrasi melalui pelibatan stakeholders. Gagasan ini lahir karena banyaknya kasus prevalensi stunting yang dipicu oleh kurangmya pemahaman bagi pasangan usia subur tentang stunting, sehingga dibutuhkan intervensi sejak dini yaitu pembelajaran stunting calon pengantin.

**Faktor pendorong keberhasilan kegiatan ini adalah :**

- Peserta Sekolah Pengantin dapat melakukan pencegahan sejak dini tentang bahaya stunting. Stakeholders dapat berintegrasi dan memahami tugas dan fungsinya dalam penanganan stunting. revalensi stunting akan menurun.
- Calon Pasangan Pengantin Mendapatkan pengetahuan terkait dengan Gizi seimbang dan tata cara perawatan bayi dan balita.
- Membekali Calon Pasangan Pengantin tentang konsep keluarga SAMARA

**Catatan penting dalam pencapaian kegiatan :**

- Calon Pasangan Pengantin Mendapatkan pengetahuan terkait dengan Gizi seimbang dan tata cara perawatan bayi dan balita
- Calon Pasangan Pengantin memahami dengan baik 1000 HPK
- Memberikan pengertian dan kesadaran kepada Calon pengantin agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga
- Membekali Calon Pasangan Pengantin tentang konsep keluarga SAMARA

**Kendala :**

Adapun kendala dalam pelaksanaan Sekolah Pengantin yaitu :

- penanganan kesehatan ibu dan anak khususnya stunting telah dilakukan lima tahun terakhir, namun progressnya belum maksimal. karena belum terintegrasinya beberapa sektor terkait, serta penyelesainnya belum menyentuk akar permasalahan penyebab utama prevalensi balita stunting menjadi tinggi ;
- sebagian besar pasangan usia subur atau calon pengantin tidak memahami dengan baik tentang stunting

**Solusi :**

- strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah melakukan perubahan pola pikir terhadap calon pengantin baru, melalui sebuah wadah yang terintegrasi dan kolaboratif bagi stakeholders yang terkait
- seluruh stakehoders terkait dapat memahami tugas dan fungsinya masing-masing dalam penanganan stunting

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 2

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan** | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | 16.67% | 40% | 40% |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Realisasi Kinerja antara 2019 dengan tahun 2017 ada kenaikan sebesar 23.33% namun ditahun 2018 tidak terdapat kenaikan.

## c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Tabel 3.9. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 2 tahun 2019 dengan target jangka menengah (RENSTRA) Balitbangren Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pemerintah yang bersih akuntabel dan Modern | Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan | Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan | 35 | 40 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Balitbangren tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 2 dari 7 target kajian litbang yang dilaksanakan pada tahun 2019, hanya 2 kegiatan litbang yang baru diterapkan dan masih dalam tahap uji coba.

## d. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

Tabel 3.10. Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

| Program | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kualitas** | **296.760.000** | **292.786.600** | **98.66** |
| **a. Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan** | 121.000.000 | 120.977.000 | 99.98 |
| **b. Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga** | 38.017.000 | 35.730.000 | 93.98 |
| **c. Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Kesehatan, KB dan Kependudukan** | 55.040.000 | 54.097.100 | 98.29 |
| **d. Kajian, Penelitian Pengembangan dan Inovasi Bidang Pemerintahan, Hukum Pemberdayaan Masyarakat dan Keagamaan** | 42.703.000 | 42.047.500 | 98.46 |
| **e. Diseminasi Hasil Kajian Penelitian dan Pengembangan Pertanian Terpadu** | 40.000.000 | 39.935.000 | 99.84 |

e. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dengan indikator sasaran Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan oleh 2 Bidang yaitu Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dengan Jumlah Pegawai masing-masing sebanyak 7 (tujuh) pegawai dengan 1 Program yang anggarannya sebesar **Rp. 296.760.000,-**

**A.3.3. Sasaran 3 :**

**"Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran"**

**a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019**

Hasil evaluasi sasaran Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 100% dengan predikat berhasil dan sesuai dengan target. Target pencapaian menunjukkan bahwa kegiatan berjalan dengan baik. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.11. Realisasi Indikator dan Sasaran 3

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
| **Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder** | Baik | Baik | 100% |

Berdasarkan analisis terhadap Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder, realisasi dengan nilai baik.

**Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :**

- Rencana kebutuhan anggaran sudah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan
- Rencana kebutuhan pemeliharaan termasuk satuan unit sudah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan
- Tim pengelola dokumen kepegawaian bekerja efektdan tepat waktu dalam menyusun dan mengusulkan dokumen kepagawaian

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Melakukan analisis kebutuhan layanan setiap awal proses perencanaan

- Peralatan dan perlengkapan kantor dapat berubah setiap tahunnya sehingga kebutuhan akan mengalami peningkatan
- Melakukan analisis kebutuhan pemeliharaan peralatan sejak awal proses perencanaan
- Adanya kemungkinan perubahan peraturan kepegawaian yang berimplikasi pada tata kelola maupun format dokumen kepegawaian
- Melakukan pemutakhiran dan penataan data kepagawaian secara periodic

**Kendala :**

- Belum optimalnya koordinasi antara Bidang dengan Sekretariat Balitbangren
- Belum maksimalnya kualitas SDM Aparatur dalam melaksanakan tupoksinya

**Solusi :**

- Mengoptimalkan koordinasi yang dilakukan terhadap setiap Bidang selaku penyedia layanan manajemen perkantoran
- Melakukan upaya peningkatan kualitas SDM terhadap aparatur yang menyiapkan layanan manajemen perkantoran

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.12. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 3

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran** | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | N/A | Baik | Baik |

Berdasarkan tabel diatas bahwa Realisasi Kinerja antara tahun 2017, 2018 dan 2019 tercapai sebesar 100% sesuai dengan target.

## c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 3 tahun 2019 dengan target jangka menengah (RENSTRA) Balitbangren Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pemerintah yang bersih akuntabel dan Modern | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | Indeks Kepuasan Masyarakat | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Balitbangren tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 3 : Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat.

## d. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Tabel 3.14. Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3

| Program | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Program manajemen perkantoran** | **742.961.350** | **721.164.030** | **97.07** |
| **Penyediaan jasa surat menyurat** | 57.750.000 | 57.750.000 | 100 |
| **Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik** | 130.728.000 | 111.010.680 | 84.92 |
| **Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional** | 5.487.250 | 5.487.250 | 100 |
| **Penyediaan jasa kebersihan kantor** | 63.251.600 | 63.251.600 | 100 |
| **Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor** | 7.700.000 | 7.700.000 | 100 |
| **Penyediaaan alat tulis kantor** | 21.752.500 | 21.752.500 | 100 |
| **Penyediaan barang cetakan dan penggandaan** | 8.750.000 | 8.750.000 | 100 |
| **Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor** | 6.167.000 | 6.167.000 | 100 |
| **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** | 9.600.000 | 7.550.000 | 78.65 |
| **Penyediaan makanan dan minuman** | 38.590.000 | 38.560.000 | 99.92 |
| **Rapat-rapat koordinasoi dan konsultasi keluar daerah** | 380.245.000 | 380.245.000 | 100 |
| **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah** | 12.940.000 | 12.940.000 | 100 |

**e.** EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran dengan indikator sasaran Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat dengan Jumlah Pegawai masing-masing sebanyak 7 (tujuh) pegawai dengan 3 Program yang anggarannya sebesar **Rp.1.254.851.350,-**

### A.3.4. Sasaran 4 :

**“Predikat SAKIP Perangkat Daerah”**

**a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019**

Hasil evaluasi sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka tingkat capaian realisasi sebesar 100% dengan predikat berhasil

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.15. Realisasi Indikator dan Sasaran 4

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
| **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** | BB | BB | 100% |

Berdasarkan suart dari Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-027/PKPT/ITKAB/700/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019, tingkat Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dengan predikat A. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan capaian implementasi SAKIP Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun cenderung peningkatannya tidak terlalu signifikan karena predikat SAKIP sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 hanya berada pada predikat BB, hal ini menandakan bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal capaian kinerja semakin baik. Tentunya diakhir tahun RPJMD diharapkan predikat SAKIP berada di nilai AA.

**Faktor pendorong keberhasilan sasasaran ini adalah :**

- Tersedianya dokumen Perencanaan Jangka Menengah, (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK)
- Pengukuran kinerja sudah menggunakan aplikasi manajemen kinerja sehingga capaian kinerja dapat diidentifikasi secara lebih cepat

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan hanya sebatas untuk menyimpulkan kemajuan atau progress kinerja, belum sepenuhnya digunakan untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
- Evaluasi internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. Namun evaluasi yang dilaksanakan hanya **sebatas** evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggarannya, belum melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan program.

**Kendala :**

Dalam upaya perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut hal-hal yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

- Hasil pengukuran kinerja yang sudah ada belum menjadi acuan dalam mengevaluasi program dan kegiatan
- Masih kurangnya dokumentasi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga mempengaruhi kualitas penyajian informasi hasil pelaksanaan kegiatan
- Belum optimalnya pengelolaan data kinerja

**Solusi :**

- Memaksimalkan aplikasi SAKIP yang sudah ada untuk melakukan pengukuran terhadap program kegiatan yang telah dilaksanakan
- Mengintensifkan koordinasi dan komunikasi terhadap setiap bidang terkait program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
- Memberikan format khusus kepada setiap pelaksana kegiatan untuk pelaporan pelaksanaan masing-masing kegiatan

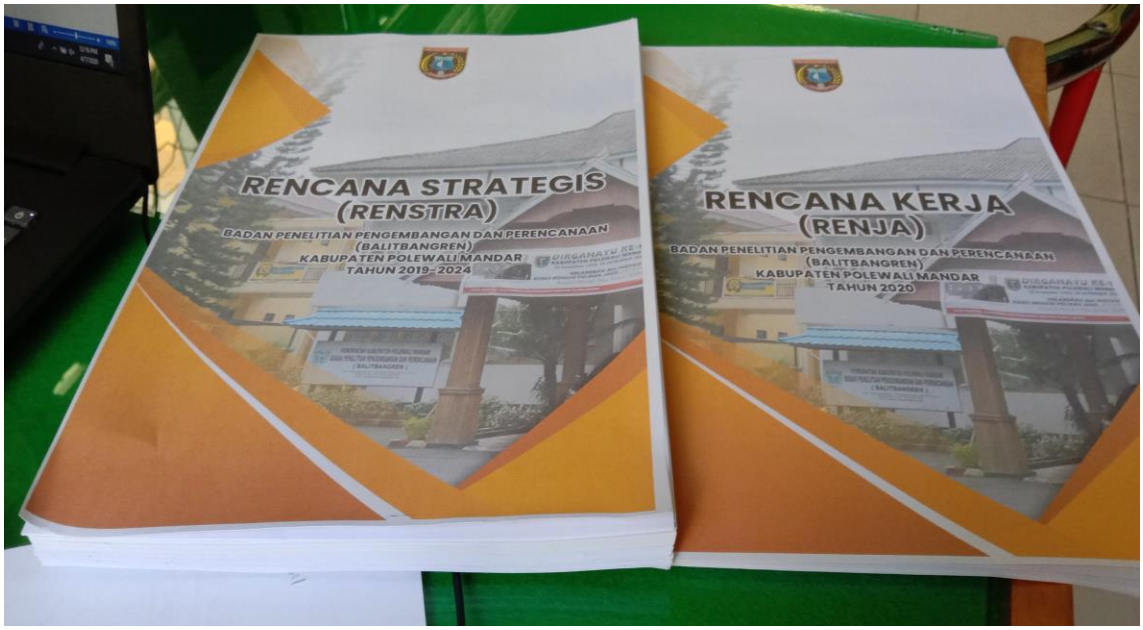

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.16. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 4

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja** | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | N/A | BB (75.78) | BB (77.45) |

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 dengan tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indicator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2018 ke 2019 capaian kinerja predikat SAKIP tetap pada posisi BB terdapat kenaikan yang tidak signifikan sebesar 1.67 point.

## c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Tabel 3.17. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 4 tahun 2019 dengan target jangka menengah (RENSTRA) Balitbangren Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pemerintah yang bersih akuntabel dan Modern | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | Predikat SAKIP Perangkat Daerah | BB | BB | BB | BB | A | A | A |

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Balitbangren tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 4, akuntabilitas kinerja SAKIP berada pada predikat BB sesuai dengan target Renstra sampai dengan tahun 2020, predikat A diharapkan tercapai pada tahun 2021-2023.

### f. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.18. Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 4

| Program | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah** | **33.400.978** | **33.360.778** | **99.88** |
| Penyusunan Renstra | 7.875.000 | 7.864.200 | 99.86 |
| Penyusunan Renja | 11.472.678 | 11.446.278 | 99.77 |
| Penyusunan RKA-DPA/DPPA-SKPD | 14.053.300 | 14.050.300 | 99.98 |

### a. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Bagian Sekretariat dengan Jumlah Pegawai sebanyak 2 (dua) pegawai dengan 1 Program yang anggarannya sebesar **Rp.319.416.878,-**

## A.3.5. Sasaran 5 :

**“Opini Pengelolaan Keuangan”**

### a. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

Hasil Opini pengelolaan Keuangan oleh BPK Sulawesi Barat dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan capaian realisasi WTP dengan tingakat capaian sebesar 100% dengan predikat berhasil.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.19. Realisasi Indikator dan Sasaran 5

| INDIKATOR KINERJA | TAHUN 2019 | | |
|---|---|---|---|
| | TARGET | REALISASI | TINGKAT CAPAIAN |
| **Opini Pengelolaan Keuangan** | WTP | WTP | 100% |

Berdasarkan Hasil pemeriksaan oleh BPK Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar untuk pengelolaan keuangan mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun terakhir pencapaian WTP dalam pengelolaan keuangan tersebut Badan Penelitian Pengembangan dan

Perencanaan akan berperan aktif dalam mendukung pencapaian tersebut. Untuk tahun 2019 Opini pengelolaan keuangan oleh BPK masih dalam tahap pemeriksaan dan diharapkan predikat WTP kembali didapatkan.

**Faktor pendorong keberhasilan sasasaran ini adalah :**

- Beberapa dokumen laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan standar dan tepat waktu
- Laporan asset yang disusun sesuai dengan standar dan tepat waktu
- Tersedianya aplikasi e-Sakip

**Catatan penting dalam pencapaian sasaran :**

- Pengelolaan SPJ yang tepat waktu berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan
- Penatausahaan asset sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan nilai yang paling tinggi dalam laporan kuangan. Sehingga harus mampu menguasai pengukuran asset, penyusutan asset, penilaian kembali, inventarisasi asset, dan pelepasan asset

**Kendala :**

- Beberapa dokumen pendukung dalam pengelolan SPJ dari bidang-bidang yang menghambat proses pengelolaan keuangan
- Kondisi barang yang belum update terlaporkan ke Bidang Asset

**Solusi :**

- Pengawasan secretariat keuangan atas penyusunan SPJ dari masing-masing bidang lebih diintensifkan melalui rapat-rapat internal
- Penguatan dan pengembangan SDM verifikasi SPJ dan pengelola asset/bendahara barang

## b. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.20. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya (2017 dan 2018) untuk sasaran 5

| Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | 2018 | 2019 |
| **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah** | Opini Pengelolaan Keuangan daerah | N/A | WTP | WTP |

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Kinerja antara 2019 dengan tahun 2017 tidak dapat diperbandingkan. Hal ini disebabkan adanya reviuw atau perubahan terhadap sasaran dan indicator kinerja Renstra yang dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2018 ke 2019 capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah tetap pada opini WTP sesuai dengan target.

## c. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET 5 TAHUN RENSTRA

Tabel 3.21. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran 5 tahun 2019 dengan target jangka menengah (RENSTRA) Balitbangren Tahun 2019-2023

| NO | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target Renstra | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Mewujudkan pemerintah yang bersih akuntabel dan Modern | Meningkatnya Kualitas pengelolaan perangkat daerah | Opini Pengelolaan Keuangan Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

Dari tabel di atas mengenai perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2019 terhadap target jangka menengah (Renstra) Balitbangren tahun 2014-2019 dapat dianalisa bahwa untuk sasaran 5, Opini pengelolaan keuangan berada pada predikat WTP sesuai dengan target Renstra dan diharapkan predikat WTP dipertahankan sampai dengan tahun terakhir renstra (2023).

## d. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran tersebut :

Tabel 3.22. Program dan Kegiatan Pendukung Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 5

| Program | Alokasi Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|
| **Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **19.204.500** | **19.186.500** | **99.91** |
| Penyusunan laporan keuangan akhir tahun | 8.879.500 | 8.875.500 | 99.95 |
| Penataan administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah | 10.325.000 | 10.311.000 | 99.86 |

## e. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang dijalankan oleh Bagian Keuangan Sekretariat dengan Jumlah Pegawai sebanyak 5 (lima) pegawai dengan 1 Program yang anggarannya sebesar **Rp.19.204.500,-**

Seluruh program dan kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 5 (lima) indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan

Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja 5 (lima) indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 5.639.051.900,-, dengan realisasi sebesar Rp. 5.392.350.062,-

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23. Efesiensi (Fisik dan Keuangan) tahun 2019

| No | Sasaran | Program | Anggaran | | | Capaian Kinerja (%) | Tingkat Efesiensi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % | | |
| **1.** | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah | Rp. 1.324.983.800,- | Rp. 1.321.881.619,- | 99.76% | 100.00 | 2.99% |
| | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Rp. 1.644.834.000,- | Rp. 1.461.282.205,- | 88.84% | | |
| | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Rp. 324.500.000,- | Rp. 321.237.467,- | 98.99% | | |
| | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya | Rp. 439.001.372,- | Rp. 427.650.462,- | 97.41% | | |
| **2.** | Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan | Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kualitas | Rp. 296.760.000,- | Rp. 292. 786.600,- | 98.66% | 114.29 | |
| **3.** | Meningkatnya | Program manajemen | Rp. 1.270.351.350,- | Rp. 1.248.006.519,- | 98.24% | **100.00** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kualitas Manajemen Perkantoran | perkantoran | | | | | |
| **4.** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah | Rp. 319.416.878,- | Rp. 300.309.378,- | 94.02% | | |
| **5.** | Opini Pengelolaan Keuangan | Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp.19.204.500,- | Rp. 19.186.500,- | 99.90% | **100.00** | |
| **JUMLAH** | | | | | **97.76%** | | **2.99%** |

Berdasarkan data tersebut, pada program dan kegiatan utama yang ditujukan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan untuk secara langsung mencapai target kinerja 5 (lima) indikator sasaran tersebut terdapat efisiensi anggaran, dimana dari alokasi dana sebesar Rp. 5.639.051.900,- yang terserap sebesar Rp. 5.392.350.062,- atau terdapat efisiensi sebesar Rp. 246.701.838,- atau 2.99% dari total anggaran.

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis Badan Penelitian Pengembangan dan perencanaan Kabupaten Polewali Mandar sebagai indikator untuk pengukuran capaian kinerja OPD yaitu meningkatnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan, meningkatnya kualitas manajemen perkantoran, meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja dan opini pengelolaan keuangan dimana 5 (lima) sasaran strategis ini terdiri dari 8 program, dengan persentase penyerapan anggaran tertinggi yaitu Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yaitu sebesar 99.90% Dengan total anggaran sebesar Rp. 319.416.878,- terealiasi sebesar Rp. 300.309.378,- dengan tingkat efisien hampir 100% kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- Penataan administrasi barang/asset perangkat daerah

Untuk program dengan nilai persentase terendah yaitu Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Persentase capaian penyerapan anggarannya sebesar 88.84% Dengan anggaran sebesar Rp. 1.644.834.000,- hanya terealiasi sebesar Rp. 1.461.282.205,- atau 88.84% Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan advokasi perencanaan sektoral bidang infrastruktur permukiman dan perumahan
- Koordinasi dan advokasi perencanaan sektoral bidang infrastruktur perhubungan dan sumber daya air
- Koordinasi dan advokasi perencanaan sektoral bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup
- Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur bidang perhubungan dan sumber daya air
- Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur bidang permukiman dan perumahan
- Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur bidang pengembangan wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup

# BAB IV
# PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2019, Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 sebagai cerminan dari hasil kinerja Balitbangren selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Didalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertuang dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor pendorong keberhasilan, catatan penting, kendala dan solusi.

Capaian kinerja Badan penelitian Pengembangan dan Perencanaan tahun 2019 secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil . hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan sebesar 102,99% serta capaian kinerja keuangan sebesar 97.76% kondisi ini menunjukkan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 2.92%.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya valliditas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.